

Teori Hubungan Internasional Relevan! Kritik terhadap Kritik

I Gede Wahyu Wicaksana

*Departemen Hubungan Internasional
Universitas Airlangga, Surabaya*

ABSTRAK

Perkembangan terkini telah menghadapkan teori Hubungan Internasional kepada kritik tajam yang terpusat pada relevansi kajian teoritis terhadap permasalahan internasional aktual. Penulis bermaksud membela relevansi filosofis dan praktis teori hubungan internasional sebagai sebuah produk intelektual. Metateori yang abstrak sekalipun terbukti sah untuk diterapkan secara empiris. Argumen dikonfirmasi melalui dua tahapan pembahasan yang meliputi: (1) falsifikasi logika berfikir yang mencetuskan keraguan mengenai status aksiologis teori hubungan internasional, dan (2) menunjukkan konteks epistemologi yang mendukung validitas teori hubungan internasional sebagai referensi sosial dan kebijakan.

Kata-Kata Kunci: teori Hubungan Internasional, kritik, relevansi, epistemologi, aksiologi, kebijakan.

Recent developments have led international relations theory to face sharp criticism centred on the relevance of theoretical studies to actual international affairs. The author intends to defend the philosophical and practical saliency of international relations theory as an intellectual product. Abstract metatheory is feasible empirically, however. The argument will be confirmed through two sections of discussion; one is the falsification of the logic behind the doubt of the axiological status of international relations theory, and two is demonstration of epistemological context favouring applicability of international relations theory for social and policy reference.

Keywords: International Relations theory, criticism, relevance, epistemology, axiology, policy.

Dalam sebuah forum seminar nasional di Surabaya pada bulan Maret 2013, seorang partisipan mengajukan pertanyaan sederhana namun memiliki implikasi epistemologis; "...teori mengatakan kalau dengan regionalisme akan tercipta perdamaian antarbangsa di suatu kawasan...bangsa-bangsa yang berkonflik mau untuk bekerja sama demi kepentingan bersama, tetapi mengapa perang terus terjadi?". Pertanyaan ini mengisyaratkan adanya dua front yang saling bertentangan yaitu antara teori hubungan internasional sebagai produk intelektual di satu sisi dan realitas politik dunia di sisi lain yang ternyata tidak saling mendukung. Lebih jauh lagi bisa diinterpretasi bahwa karya akademik yang abstrak dan canggih terkodifikasi ke dalam teorisasi tetap tertinggal di belakang fenomena sosial yang belum bergerak dari kondisi *status quo*.

Kesenjangan antara teori/dunia intelektual dan fenomena aktual/praktik hubungan internasional diakui oleh Christian Reus-Smit (2012, 525-526) sebagai penyebab munculnya kritik tajam terhadap relevansi bidang Studi Hubungan Internasional. Kritik datang dari pelbagai kalangan. Para pembuat kebijakan publik berseru agar penstudi hubungan internasional melakukan riset yang melayani 'kepentingan nasional' negara, dan bukan menjadi pengkritik semata yang bicara tentang etika, norma, rasio dan metode tanpa aplikasi yang nyata bagi kepentingan masyarakat. Universitas pun menempatkan diri sebagai pengkritik keabsahan teorisasi sebagai pengetahuan yang rumit dan tidak praktis. Sementara itu media massa sering mencibir para teoritis sebagai normatif, hanya karena pendapat mereka sarat opini yang sulit dijelaskan. Intinya kritik terfokus pada pertanyaan apakah relevansi praktis teori hubungan internasional? Mengapa mengedepankan teori daripada analisis kejadian dunia yang riil?

Kritik juga datang dari dalam komunitas epistemik Hubungan Internasional. Mereka misalnya mengatakan bahwa yang terpenting adalah pencarian fakta/bukti konkrit yang signifikan (*explaining why things happen*), bukan konstruksi teori yang abstrak dan acapkali absurd. Reus-Smit (2012, 526) menegaskan jika saat ini Studi Hubungan Internasional berada di tengah zaman yang serba instan. Selalu ada semangat anti-teori dalam setiap disiplin. Tidak hanya teori tingkat tinggi (*metatheory*) saja yang dipertanyakan, dipersalahkan dan akhirnya ditinggalkan, tetapi hasil penelitian empiris pun harus diperlakukan sedemikian rupa sehingga enak serta mudah dicerna oleh para pembuat kebijakan. Di kalangan akademisi hubungan internasional menjalar kebiasaan baru untuk menghindari perdebatan metateori atau diskusi yang bersifat paradigmatik. Sudah menjadi semacam tren untuk memproduksi teori berskala menengah (*middle-range theory*) yang spesifik mengacu pada suatu permasalahan tertentu (*problem-specific theory*), dan menjauhi segala bentuk teorisasi universal. Ranah

akademik ini berawal dari asumsi bahwa antara pemahaman teoritis dan relevansi praktis terdapat hubungan *zero-sum*; posisi yang sebenarnya tidak adil bagi teori dan penteoris hubungan internasional.

Penulis mengambil sikap yang sama dengan Reus-Smit. Teori hubungan internasional tetap merupakan produk ilmiah yang punya relevansi tinggi dalam dunia nyata. Teori yang paling abstrak sekalipun dapat diterapkan ke dalam proyek empiris kebijakan publik dan politik luar negeri. Kalaupun memang ada anggapan Studi Hubungan Internasional kekurangan pembuktian praktis, hal itu tentu saja bukan disebabkan karena teorisasi yang berlebihan.

Para filosof politik internasional mempertahankan validitas dan fisibilitas teorisasinya dengan menitikberatkan pada aspek ontologis – seperti verifikasi konsistensi dan inkonsistensi eksplanasi teoritis dalam gagasan seseorang (contohnya Barry 2006, 89-107; Brettschneider 2011, 73-83 dan Snedeker 2004). Penulis memilih cara yang berbeda. Argumentasi yang dibangun lebih mengedepankan komponen epistemologi yang bersesuaian dengan aksiologi Studi Hubungan Internasional dan teorisasinya. Argumentasi penulis adalah kritik balik terhadap pengkritik yang meragukan arti penting empiris teori hubungan internasional. Untuk itu, pertama tama dilakukan falsifikasi logika berfikir yang menjadi akar keraguan para pengkritik teori hubungan internasional, dan kemudian disusul dengan analisis kontekstual mengenai relevansi epistemologis dan aksiologis teori terhadap fenomena hubungan internasional.

Falsifikasi Logika Para Pengkritik

Titik awal penelusuran terhadap kritik ketidakrelevanan teori hubungan internasional ialah mencari tahu darimana sebenarnya sumber kritik tersebut berasal. Apabila sumber yang dimaksud adalah pihak/afiliasi, maka jawabannya tentu beraneka ragam. Karenanya, sumber yang dirujuk di sini adalah ide dan metodologi. Selain itu, tidak mungkin untuk mengumpulkan data siapa saja para pengkritik, latar belakang intelektual mereka dan motivasi khususnya. Kegiatan seperti ini akan berdampak kepada pembentukan oposisi-oposisi biner yang tendensius dan bisa jadi malah menghadirkan sebuah bentuk chauvinisme pengetahuan. Contoh nyata ialah kritik yang dilontarkan sejumlah ilmuwan politik internasional yang mengaku kritis terhadap Westernisasi teori hubungan internasional dalam paradigma dominan seperti realisme dan liberalisme (misalnya Chen 2012, 463) hanya menimbulkan pengkutuban teoritis Barat dan non-Barat yang sebenarnya semakin mempertontonkan sisi normatif teorisasi masing-masing. Orientasi perspektif teori Barat dan non-Barat berbeda pada

temuan terkait mana yang lebih strategis dan mana yang lebih normatif. Padahal semua jenis teorisasi tidaklah murni strategis ataupun normatif; selalu ada perbincangan tentang unsur ideal seperti kebaikan bersama dalam setiap sudut pandang mereka (lihat misalnya analisis Mantena 2012, 455-470 yang membandingkan realisme dan politik nirkekerasan Gandhian).

Dengan demikian yang lebih patut untuk dipersoalkan ialah dengan cara apa kritik terhadap teori hubungan internasional dibuat; apa yang menjadi dasar penilaiannya; dan seberapa akuratkah ukuran-ukuran yang dipakai. Sebuah survei komprehensif mengenai relevansi teori hubungan internasional melalui kegiatan pengajaran (*teaching*), penelitian (*research*) dan telaah persepsi kebijakan internasional (*international policy views analysis*) dipublikasikan oleh James D. Long et al. (2012) mengindikasikan angka fantastis yaitu 85% responden mengungkapkan ada *gap* antara hasil riset akademisi dan kebutuhan komunitas pembuat kebijakan. Hampir separuh responden mengakui bahwa kesenjangan tersebut kian meningkat dalam 10 tahun terakhir. Survei Long et al. meliputi wawancara dengan responden di 20 negara, namun sampai tulisan ini dibuat data yang dipamerkan baru menggambarkan hasil wawancara terhadap responden di Amerika Serikat saja. Tentu bukan masalah berapa banyak data yang ditampilkan untuk mendukung pendapat Long et al., tetapi mengapa yang menjadi indikator terpenting adalah tingkat persepsi para politisi. Long et al. (2012, 3-4) mendefinisikan relevansi secara sempit sebagai dampak (*impact*) terhadap kebijakan nasional maupun internasional. Sehingga pengertian dan ruang lingkup relevansi mendekati sesuatu yang tidak dapat diindera (*intangible*) dan memihak.

Bila survei Long et al. dibedah dengan lebih seksama, analisis kualitatif Long et al. tidak memberi responsi yang pasti terhadap pertanyaan; apakah para politisi mampu menterjemahkan teori secara efisien ke dalam bentuk kebijakan; apakah aspek ideologis para pembuat kebijakan yang cenderung mendikte pola pikir mereka bisa disamakan dengan preskripsi teoritis akademisi; apakah faktor sosialisasi tentang bagaimana luaran kebijakan dapat mempengaruhi generasi berikutnya yang akan mengambil peran pembuat kebijakan telah dikonfirmasi; dan sederet persoalan lain yang menyangkut tolok ukur di balik survei tersebut. Dengan falsifikasi sederhana saja dapalah disampaikan bahwa klaim Long et al. tentang difisit relevansi praktis teori hubungan internasional bersumber dari intuisi.

Penulis tidak ingin memperlakukan intuisi sebagai sumber pengetahuan yang salah, ataupun menggunakannya sebagai alat untuk menyerang balik para pengkritik melalui eksposisi data empiris tentang relevansi teori hubungan internasional. Maksud yang lebih tepat untuk

diutarakan ialah menyelidiki dan mendekonstruksi bagaimana keraguan mengenai ketidakrelevanan teori hubungan internasional bisa muncul; mempertanyakan legitimasi tesis teori versus relevansi praktis.

Beberapa faktor bisa disebutkan untuk unit eksplanasi (Reus-Smit 2012, 527): (1) pasar pengetahuan yang kian ramai dengan bermunculannya beragam jenis spesialisasi ilmu baru sehingga permintaan akan gagasan teoritis hubungan internasional semakin sedikit; (2) sistem insentif akademik yang tidak mendukung; (3) ketidakselarasan antara dunia akademik dan realita yang dihadapi para pembuat kebijakan, terutama bila akademisi membutuhkan waktu terlalu lama untuk memahami pola-pola kejadian sehari-hari (*day-to-day affairs*) yang dengan segera perlu ditanggapi oleh para pembuat kebijakan; (4) perbedaan yang terlalu besar karena budaya dan media komunikasi; (5) asumsi ortodox bahwa integritas dan obyektivitas keilmuan harus dibarengi dengan keterjarakan antara sains dan kebijakan.

Bagi penulis, justru yang paling besar peranannya sebagai penyebab ketidakselarasan antara teori dan relevansi praktis hubungan internasional ialah teorisasi yang eksklusif, pemberian apresiasi yang berbanding lurus hanya dengan level abstraksi teorisasi – semakin abstrak teori maka semakin tinggi penghargaan atasnya, fokus yang sangat introspektif, dan ketidakcocokan antara isu dunia nyata dan problematika penelitian yang digeluti para penstudi politik global. Argumentasi teori versus relevansi praktis sebenarnya sudah mencuat sejak dekade 1980an dan 1990an yang dikenal sebagai ‘the Third Debate’ dalam Studi Hubungan Internasional, termanifestasi menjadi kritik posstrukturalis/positivis terhadap behavioralis/saintifik yang memproduksi metateori secara massif (Smith 1999). Memasuki milenium ketiga, kritik semakin intensif dan akhirnya mengerucut menjadi analisis eklektik (*eclectic analysis*) dengan pesan aksiologi yang sangat kuat bahkan melebihi tuntutan epistemologi. Franke dan Weber (2012, 669-691) menamakan pendekatan eklektik sebagai pragmatisme dalam metodologi hubungan internasional. Argumentasi pokok eklektikisme ialah teori tetap penting – namun mereka berkilah – hanya bila diformulasi ke dalam bentuk hipotesis yang dapat diuji secara empiris dan menggunakan alat ukur riset empiris. Tanpa teori empiris, para analis eklektik mengklaim Studi Hubungan Internasional akan cenderung *self-indulgent* dan dalam beberapa kasus *self-righteous* karena terlalu fokus pada penciptaan metateori yang abstrak.

Tawaran analisis eklektik berhasil menggeser sumbu utama perdebatan metateori hubungan internasional, teori skala menengah kini seolah menjadi norma dan sains normal. Melepaskan diri dari ritualitas perang paradigma yang selama setengah abad mengungkung para sarjana hubungan internasional, penganut eklektikisme menyodorkan

pendekatan terbaru yang menekankan pada penelitian berorientasi penyelesaian masalah (*problem-solving-driven research*), dengan kombinasi dan harmonisasi beberapa paradigma/program riset yang berlawanan (*incompatible paradigms*) demi mendapatkan pemahaman yang tepat dan terukur (Wallace 1996, 301-21). Dengan cara berfikir pragmatis, tidak salah apabila ada yang menyebut eklektikisme sebagai refleksi sempurna pragmatisme filsafat ilmu pengetahuan ala Amerika. Sekalipun demikian perlu kiranya dicatat jika analisis eklektik bukan proyek anti-teori, melainkan penciptaan teori skala menengah untuk menerangkan fenomena politik global. Teorisasi eklektik menolak perdebatan metateori tanpa henti, dan mengklaim apabila teorisasi terlampaui abstrak, maka teori menjadi tidak praktis dan tidak relevan (Reus-Smit 2012, 530). Jadi pertikaian antara teori dan relevansi praktis masih eksis walaupun analisis eklektik telah berkontribusi melalui program teori skala menengahnya (Reus-Smit & Snidal 2008).

Analisis eklektik memiliki komitmen yang kuat pada hal-hal praktis, pengetahuan bersubstansi penjelasan dan penyelesaian masalah internasional aktual, dan penemuan nilai teoritis dalam diskursus sosial dan kebijakan publik yang lebih luas. Para teoritis melihat eklektikisme menyamakan metateori sebagai seperangkat pemikiran yang menjauhkan peneliti dari tujuan-tujuan sosial yang konkrit. Eklektikisme berpandangan pertentangan-pertentangan ontologis dan epistemologis fundamental tidak akan pernah bisa diselesaikan (Wallace 1996, 303). Contohnya, tidak akan pernah ada jawaban yang disepakati untuk pertanyaan seperti; apa sajakah yang bisa disebut sebagai unsur kebenaran (*truth*); manakah yang lebih esensial faktor ideal atautkah material; manakah yang lebih berperan agensi atautkah struktur; dan apakah moral, norma dan etika punya dasar epistemologi empiris (Franke & Weber 2012, 688). Para eklektikis kemudian menyarankan agar memisahkan metateori dari klaim substantif dan isu spesifik, dan kemudian menggabungkan dan menyelaraskan yang spesifik untuk menghasilkan kerangka berfikir yang lebih kaya (Wallace 1996, 313). Dengan metode berfikir eklektik, menurut Sil dan Katzenstein (2010, 14) kesenjangan antara teori abstrak dan pengetahuan praktis yang dibutuhkan para pembuat kebijakan akan dapat diperkecil, artinya teori hubungan internasional jadi lebih relevan.

Ada perbedaan substantif antara target kritik analisis eklektik dan materi 'the Third Debate' dalam Studi Hubungan Internasional. Yang pertama menargetkan kontestasi antarparadigma sebagai sasaran kritik – yang meliputi realisme, liberalisme, konstruktivisme, *critical theory*, dan posmodernisme – yang telah menjadi struktur episteme hubungan internasional selama setengah abad yang lalu. Sedangkan 'the Third Debate' memuat kritik terhadap strukturalisme – termasuk behavioralisme dan modernisme. Sehingga bisa dikatakan analisis

eklektik tidak mempermasalahkan asal muasal/etiologi dan proposisi teori, melainkan tesis teori versus relevansi praktis sebagai fokusnya (Reus-Smit 2012, 530; Sil & Katzenstein 2010, 16). Bagi penulis inilah sumber utama kekeliruan logika keraguan mengenai relevansi praktis teori hubungan internasional – dalam wadah analisis eklektik – yang melupakan dua elemen krusial dalam evolusi Studi Hubungan Internasional, yakni: (1) identitas dan tujuan, dan (2) gagasan dan figur intelektual publik internasional. Intinya keinginan untuk menjadi praktis itulah yang membuat para analis eklektik mengecilkkan arti penting teorisasi khususnya generalisasi universal/metateori.

Sebelum memfalsifikasi logika analisis eklektik di atas, penulis hendak menegaskan posisi bahwa tesis teori versus relevansi praktis juga hidup dan direvitalisasi dalam ‘the Third Debate’. Sebagaimana diungkapkan oleh Rens Van Munster (2008, 720-746), generasi milenium ‘the Third Debate’ mempermasalahkan paradigma kritis yang sangat kritis terhadap saintifikisme namun lemah dalam preskripsi sosial dan kebijakan. Jika analisis eklektik mengklaim pendekatan metodologinya sebagai lebih berorientasi praktis, lalu apakah itu sepenuhnya merupakan program riset orisinal dan baru? Para sejarawan dan teoritis hubungan internasional akan dengan mudah dapat menemukan manipulasi dan modifikasi dalam klaim epistemologi eklektikisme.

Kekeliruan logika berpikir para pengkritik muncul karena kealpaannya tentang identitas dan tujuan Studi Hubungan Internasional sedari awal bidang kajian ini berdiri sendiri sebagai disiplin. Pada mulanya para pendiri disiplin mandiri politik internasional sudah mengimajinasikan bahwa studi mereka akan berkomitmen besar dan mengabdikan penelitian kepada masalah-masalah praktis. Analisis, interpretasi dan refleksi teoritis diarahkan untuk beradaptasi dengan fenomena aktual hubungan antarbangsa, dan untuk mengadopsinya sebagai metateori dengan harapan akan dapat mendorong perdebatan intelektual di tengah ruang publik (Hocking & Smith 1995, 20). Semangat para pioner disiplin Hubungan Internasional sebenarnya identik dengan cara Jurgen Habermas menteorikan wacana, keinginan dan fantasi dalam ruang publik yang memediasi antara masyarakat dan negara (lebih lengkap dalam MacKendrick 2007).

Dalam konteks ini, pengertian ruang publik tentu saja tidak sesempit analogi pemerintahan dan proses pembuatan kebijakan luar negeri yang elitis, melainkan mencakup keseluruhan dunia sosial beserta aktivitas komunikasi dan pergumulan gagasan. Definisi Habermasian tidaklah canggung untuk berdialog dalam ruang politik kelas tinggi seperti arena diplomasi antarpemerintah dan organisasi internasional. Habermasian pun tidak melepaskan diri dari identifikasi intelektual sebagai akademisi. Dengan demikian apakah tesis teori versus relevansi praktis

sangat primer artinya dalam perbincangan akademik hubungan internasional sementara intelijensia disiplin tersebut semenjak awal perkembangannya telah memberi perhatian besar pada relevansi praktis dalam definisi luas dan humanis.

Salah satu barometer yang dijadikan ukuran oleh para analis eklektik untuk menyimpulkan kurangnya nilai praktis teori hubungan internasional adalah secara kuantitatif hanya terdapat sedikit sarjana hubungan internasional yang menjadi figur intelektual publik bertaraf internasional. Wallace (1996, 314-316) dengan terang mengatakan bahwa Studi Hubungan Internasional akan lebih relevan apabila dipenuhi oleh tokoh-tokoh intelektual praktis; akademisi yang memahami betul seluk beluk dunia politik dan pembuatan kebijakan; serta menampilkan peran sebagai pengatur arah kebijakan dan praktik internasional. Mereka disebut sebagai intelektual publik internasional. Kali ini hipotesis Wallace dan para analis eklektik yang mengikutinya dapat dipatahkan dengan mudah.

Pertama, ada sederet nama besar dalam dunia politik internasional kontemporer seperti Henry Kissinger, Edward Carr, dan Patrick Angell yang memiliki tiga karakter intelektual publik internasional, yakni pengetahuan, menegakan prinsip dan nilai intelektual serta berkomitmen penuh untuk melibatkan diri dalam kehidupan sosial yang luas (Byman dan Pollak 2001, 107).

Kedua, alumni dan akademisi Studi Hubungan Internasional tidak hanya terlibat dalam proses birokrasi pemerintahan. Pengetahuan yang mereka miliki diabdikan demi kepentingan yang lebih luas. Ada banyak contoh mengilustrasikan para sarjana hubungan internasional ambil bagian dalam pembicaraan publik dengan menjadi jurnalis, kolumnis dan advokat berbagai wacana internasional kritis; mulai dari perlombaan senjata hingga isu lingkungan dan kesehatan. Terlepas dari banyak sedikitnya teori yang dirujuk, pengetahuan mereka telah dikondisikan secara baik. Sehingga konteks aplikatif teori hubungan internasional diwujudkan secara sosial dan komunikatif.

Relevansi Teori Hubungan Internasional

Klaim utama penulis adalah teori hubungan internasional – termasuk metateori yang abstrak – memiliki relevansi praktis dalam dunia empiris. Sebelum membuktikan argumen tersebut, perlu kiranya dicatat tiga hal penting yang menyangkut eksistensialisme tesis teori versus relevansi praktis. Pertama, komplin terhadap ketidakrelevanan teori hubungan internasional tidak seharusnya diartikan sebagai penolakan terhadap keseluruhan isi teorisasi, melainkan konsern terhadap

penteorian berlebihan dalam konteks abstraksi tinggi tetapi kurang disertai dukungan bukti konkrit.

Kedua, semua teorisasi dalam disiplin sains mempunyai tingkat keabstrakan tertentu, sehingga perlu dikontemplasi lagi mengapa akademisi hubungan internasional harus gusar terhadap teori abstrak yang dihasilkan dalam bidang studinya, sementara ilmuwan Fisika, para ekonom, sosiolog maupun psikolog, misalnya, memberi perhatian besar kepada peningkatan kualitas teorisasi melalui tingginya abstraksi teori.

Ketiga, jika para pembuat kebijakan di pelbagai negara mengeluhkan soal sulitnya memahami konten dan preskripsi analitis yang disampaikan oleh para penulis artikel akademik dalam jurnal-jurnal hubungan internasional, sudah semestinya disadari oleh kalangan akademisi bahwa pemerintahan adalah birokrasi dan bukan komunitas epistemik yang terbuka secara kognitif. Birokrasi senantiasa tergantung kepada kelompok cendekia di sekitarnya yang mempunyai perspektif sendiri sesuai dengan latar belakang mereka. Dengan demikian tesis teori versus relevansi praktis bukanlah bagian dari proyek antiteori, tetapi mengkonfirmasi pesan penyelidikan teoritis merupakan awalan bagi generasi pengetahuan praktis.

Untuk membela relevansi metateori hubungan internasional dibutuhkan suatu pemahaman yang sah mengenai definisi teori dan metateori, dan kemudian mensituasikan keunikan teorisasi hubungan internasional di dalam konteks filsafat pengetahuan (*the philosophy of knowledge*). Dalam filsafat pengetahuan sosial, teori didefinisikan sebagai serangkaian konsep yang memiliki kesesuaian, konsistensi dan koneksi logika maupun fakta empiris yang bisa dipakai untuk instrumen analisis fenomena yang tengah diamati (Guthrie 2010, 41). Teori-teori yang mempunyai asumsi dasar identik dihimpun ke dalam konstruksi metateori. Karenanya metateori menjadikan teori sebagai subyek. Metateori memiliki karakteristik prinsipil yang ketat dan khas, sehingga perbedaan di antara metateori-metateori cenderung fundamental dalam arena operasionalisasi – disebut pula metodologi. Metateori jelas lebih abstrak daripada teori (McKenzie et al. 1997, 122).

Metateori memuat kaidah-kaidah normatif mengenai tiga unsur riset sosial, yaitu: epistemologi, ontologi dan metaetika. Epistemologi merupakan standar, validasi dan akuisisi pengetahuan. Ontologi bicara mengenai otentisitas, kategori dan relativisme kebenaran faktual. Metaetika atau sering disebut aksiologi merepresentasikan ukuran benar atau salah, komponen argumentasi moralitas, dan kesinambungan nilai-nilai seperti kepraktisan dan kepatutan (Anastas 2012, 257-265).

Bagi penulis ketiga unsur metateori tidak dapat dipisahkan, walaupun filsuf sains seperti Thomas S. Kuhn menganggap ketiganya termanifestasi ke dalam wilayah berbeda-beda. Domain sains atau proses saintifikasi adalah epistemologi; sementara filsafat fokus pada ontologi dan metaetika dikeluarkan dari kedua kategori tersebut untuk mencapai kondisi positivisme atau sains normal (Dietze 2001, 52-59).

Alasannya sederhana. Sains dikonstruksi dalam level metateori. Semua jenis pengetahuan pasti memiliki ruang lingkup spesialis yang menjadi ontologinya. Sistematisasi pengetahuan menuruti aturan-aturan metodis yang ditetapkan oleh epistemologi. Kemudian, para saintis tidak pernah bisa sepenuhnya acuh terhadap aspek moral, budaya dan eksistensi praktik tertentu. Untuk itulah sains akan lengkap hanya jika ketiga unsur berpadu. Analoginya, apakah kajian sastra hanya memuat unsur estetika semata? Apakah Fisika hanya mendemonstrasikan gejala-gejala fisik tanpa perlu hirau pada dimensi sosiologis? Sebaliknya bolehkah ilmuwan sosial menjadikan karya seni sebagai referensi empiris? Apakah ilmuwan eksak tidak diperkenankan berdiskusi mengenai hal-hal yang normatif? Jelas pertanyaan-pertanyaan ini tidak diprediksi sebelumnya oleh Kuhn dan generasi behavioralisme saintifik karena mereka hanya memperdulikan unsur epistemologi; keinginan menjadi ilmiah telah mengabaikan signifikansi etis dan filosofis. Metateori hubungan internasional – sebagaimana disampaikan di bagian sebelumnya – sedari awal sudah dimaksudkan untuk mencakup ketiga komponen filsafatis Kuhnian. Disiplin Hubungan Internasional tidak membatasi diri pada salah satu saja.

Di dalam risalahnya yang sangat berpengaruh, *The Structure of Scientific Revolutions*, Kuhn (1970) berpendapat bahwa semua teori dan metateori berkompetisi untuk meraih status paradigmatis yang stabil. Kestabilan menentukan seberapa kuat legitimasi pengetahuan yang dikandung dalam teori tersebut. Jika argumentasi Kuhn direfleksikan dalam Studi Hubungan Internasional, maka akan tampak adanya ‘pasang surut’ metateori. Pada suatu masa didominasi oleh metateori tertentu sampai digantikan oleh yang baru dan lebih kuat legitimasinya. Faktanya, yang terjadi dalam evolusi disipliner hubungan internasional adalah semua metateori – mulai dari realisme klasik hingga teori kritis (*critical theory*) – punya tempat masing-masing untuk tumbuh.

Komunitas episteme yang bersandar kepada salah satu mazhab tidak dapat menegasikan secara total keberadaan yang lain. Yang terjadi dalam konteks keilmuan sosial pada umumnya bukan ‘*the structure of scientific revolutions*’ melainkan ‘*the structure of scientific choices*’. Tidak mungkin mengibaratkan ketidakrelevanan suatu metateori hanya bila metateori baru muncul. Semua metateori relevan tergantung kepada maksud penggunaannya. Ilmu eksak dan ilmu sosial, dalam hal ini,

berbeda karena mengandaikan dalil sains sosial akan akurat dan terukur secara konsisten dengan bukti empiris tidak dapat diterima. Relevansi ilmu sosial – termasuk Studi Hubungan Internationasl - bersifat fleksibel. Relevansi kajian sosial akan meliputi tidak saja apa yang dilihat, tetapi bagaimana mengatur apa yang terlihat; menghubungkan agen dan struktur; memisahkan kepentingan dari kepercayaan; menemukan kaitan antara materi dan idealisme; dan lain sebagainya yang mengilustrasikan karakter kompleks dunia sosial.

Berangkat dari argumen di atas, jika relevansi praktis menjadi pertanyaan/permasalahan nomor satu saat ini, penulis menjawab teori hubungan internasional selalu relevan. Pertama, secara epistemologis relevansi teori dapat diuji dari jenis pertanyaan yang diajukan saat melakukan penelitian hubungan internasional. Hal ini tentu tidak berarti bahwa untuk menjadi relevan teori hubungan internasional harus dapat merespon semua persoalan yang ditemukan oleh praktisi. Teori hubungan internasional relevan sebab tidak hanya menanyakan dan menjawab pertanyaan retrospektif tentang praktik di masa lalu – tentang karakter, sumber dan konsekuensinya – melainkan menjangkau praksis seperti apa yang harus dilakukan oleh agen (*ought-to-type question*).

Sebagaimana Reus-Smit (2008, 53-82) berargumen teori hubungan internasional akan relevan saat membahas bagaimana aktor-aktor internasional (negara, individu, organisasi internasional dan perusahaan multinasional) harus bertindak di dalam lingkungan global. Prakondisi ini telah terpenuhi oleh asumsi dan arahan metateori yang menggeluti persoalan preskripsi sikap aktor seperti konstruktivisme. Apabila tekanan terkuat dalam epistemologi ialah mengumpulkan sebanyak mungkin fakta yang dapat diverifikasi, maka pertanyaan diubah menjadi ‘apakah yang terjadi (*what-is-type question*) daripada sibuk dengan ‘apa yang semestinya’. Untuk kepentingan inipun metateori hubungan internasional dapat diandalkan. Tema-tema pilihan epistemologi hubungan internasional sebenarnya telah banyak didiskusikan dalam ‘The Second Debate’, yang mendekati tuntutan saintifisme melalui perilaku; dengan kesimpulan metateorilah yang menjadi determinasi orientasi studi terhadap permasalahan aktual, dan membentuk struktur argumentasi para peneliti (Kratochwil 2010).

Kedua, perlu ditelusuri dengan jelas asal usul klaim ketidakrelevanan metateori dengan logika dasar kritik tersebut. Maksudnya, secara historis metateori hubungan internasional yang revolusionerlah sejatinya merupakan faktor yang berkontribusi dalam mendorong kemunculan kritikus teori bermoto analisis eklektikisme. Pendekatan kontemporer ala filsuf pragmatis Amerika mengatakan perang paradigmatik tidak akan pernah dimenangkan, sehingga beralihlah

kepada metode berfikir yang lebih praktis, dan tinggalkan metateori yang abstrak (Sil dan Katzenstein 2010). Pendapat mereka tidak bisa dibenarkan secara epistemologis. Dua puluh lima tahun ke belakang, ketika Studi Hubungan Internasional di Amerika Serikat diramaikan oleh perdebatan teoritis antara neo-realisme dan neo-liberalisme (*the neo-neo debate*), tidak seorang pun berinisiatif buat beranjak dari posisi *status quo* satu di antara kedua kubu menuju sikap alternatif, apalagi eklektis yang sarat dengan kesulitan-kesulitan metodologis.

Setelah 'The Third Debate' hadir sekitar awal 1990an, para penstudi politik global Amerika ternyata tidak berbondong-bondong untuk menjadi teoritis kritis maupun posmodernis/posstrukturalis, walaupun mereka faham bahwa relativisme/nihilisme yang dituduhkan kepada teori kritis dan posmodernisme/posstrukturalisme sebenarnya adalah kombinasi antara epistemologi neo-positifisme dengan ontologi rasionalis Eropa (the British School) yang menghasilkan aturan main baru dalam analisis eklektikisme. Para pengkritik anti-fondasionalis tersebut percaya bahwa tidak ada absolutisme epistemologi; tidak ada satu standardisasi metodis penelitian. Karenanya mereka beranggapan jika legitimasi metateori kian lama kian berkurang sebagai rujukan (Franke dan Weber 2012, 689-690). Pertanyaannya kemudian ialah; apakah kemunculan gaya analisis semacam antifondasionalisme atau eklektikisme bermakna hilangnya relevansi metateori hubungan internasional? Apakah sebuah refleksi praktis akan dengan sendirinya mengikis esensi filosofis dan etis metateori yang merupakan referensi tertinggi kegiatan teoritis?

Para filsuf sains berujar bahwa neo-positifisme/pospositifisme adalah positifisme dalam bentuk lain, analog tesis teori versus relevansi praktis juga adalah bentuk lain dari kompetisi antarmetateori, dan oleh sebab itu komposisi struktural Studi Hubungan Internasional masih sama dengan sebelumnya. Terkait dengan tuntutan relevansi analisis eklektikisme, pendekatan inipun adalah sebuah metateori dalam bentuk yang lain. Untuk memperjelas klaim ini, bisa diperlihatkan contohnya melalui perkembangan teorisasi terkini. 'The Third Debate' memberi perhatian besar pada politik identitas dan partikularitas budaya sebagai variabel independen penelitian yang pada gilirannya membidani kelahiran konstruktivisme (Kowert 2001; Kubalkova 2001).

Dalam tataran epistemologi paradigma konstruktivisme tidak mempersalahkan rasionalisme dan yang lain-lain. Mereka hanya bersilang pendapat soal ontologi. Bagi penulis, perselisihan ontologis antarmazhab dalam sebuah komunitas epistemik merupakan sesuatu yang wajar dan perlu demi kemajuan. Yang kurang relevan untuk dibesar-besarkan adalah klaim keunggulan epistemology tertentu atas

yang lainnya, karena hakikat epistemologi adalah pilihan berdasarkan pada kepentingan penelitian.

Ketiga, umumnya para ilmuwan sosial dan penstudi hubungan internasional meyakini bahwa riset yang berkualitas adalah produk dari proses penyelidikan yang sistematis (*sound inquiry*) dan memberikan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan (*plausible conclusion*). Para pluralis dalam komunitas keilmuan hubungan internasional sepakat jika permasalahan yang berbeda memerlukan tipe penelitian yang berbeda dengan dibarengi oleh strategi argumentasi yang berbeda pula. Namun mereka setuju kalau dibalik keberagaman tersebut terdapat kerangka acuan kualifikasi yang berlaku universal.

Penelitian yang bagus haruslah disusun dengan tujuan yang jelas dan terfokus, mengetengahkan argumentasi yang koheren dan progresif, menunjukkan penguasaan memadai mengenai penjelasan-penjelasan alternatif, serta ketersediaan dukungan fakta empiris dan termasuk interpretasi tekstual yang dapat dikoraborasi. Satu poin yang acapkali dilupakan oleh para peneliti dan penstudi hubungan internasional - menurut Reus-Smit (2012, 533-534) - adalah arti penting refleksi metateori dalam program penelitian. Hanya metateori yang memungkinkan seorang peneliti untuk bersikap jujur secara epistemologis, ontologis and metaetika melalui refleksi asumsi-asumsi ketiganya. Refleksi utuh terhadap asumsi epistemologi akan mengarahkan peneliti untuk hanya mengajukan pertanyaan esensial tertentu saja, sehingga ia akan terhindar dari kesulitan untuk menentukan mana yang penting dan tidak penting. Refleksi ontologi memberi panduan kepada seorang pengamat, peneliti dan khalayak agar dapat memahami fakta-fakta sosial diluar jangkauan visioner mazhab yang dianutnya. Sementara refleksi metaetika membantu penstudi hubungan internasional untuk bersikap adil dan netral terhadap pelbagai isu moral seperti ketimpangan global, HAM dan kosmopolitanisme. Dengan demikian metateori selalu memiliki relevansi yang pasti dibalik sifat abstraknya.

Kesimpulan

Perdebatan mengenai apakah teori/metateori hubungan internasional relevan untuk dunia sosial khususnya bagi kebutuhan praktis para pembuat kebijakan sebenarnya bukan tema yang seluruhnya baru dan sepenuhnya salah untuk diangkat. Studi Hubungan Internasional sejak inepsinya telah memperlihatkan kepedulian terhadap masalah relevansi kajian politik dan politik internasional bagi kemaslahatan umat manusia. Mulai dari 'The First Debate' hingga ke 'The Third Debate' – dan kemunculan generasi keduanya dalam 'The Forth Debate',

tesis teori versus relevansi praktis terus diperbincangkan. Yang membedakan hanyalah konteks untuk setiap perdebatan tersebut berlangsung. Perdebatan-perdebatan teoritis dan kepraktisan perlu dipahami sebagai bukan upaya untuk membuktikan bahwa satu metateori ataupun tradisi epistemik tidak relevan ataupun kurang signifikan dibandingkan dengan yang lainnya. Apabila tujuannya adalah memperbandingkan tingkat relevansi, maka aktivitas dimaksud tidaklah bebas nilai dan tendensius.

Kritik yang diulas dalam tulisan ini memang ditargetkan secara khusus untuk memfalsifikasi logika berfikir pragmatis analisis eklektikisme. Ada tiga inkonsistensi yang terkandung dalam paradigma praktis eklektikisme. Pertama, jika tujuan akhirnya adalah untuk simplifikasi metodologi, maka analisis eklektikisme bisa dianggap baik dan efektif. Tetapi jika sasarannya adalah komprehensifitas eksplanasi, pendekatan tersebut amatlah inkremental. Kedua, terkait dengan yang pertama, analisis eklektikisme cenderung mengabaikan fakta bahwa kekayaan intelektual sebuah produk ilmu pengetahuan terbukti dari seberapa besar variasi paradigmatis yang dimilikinya. Paradigma tunggal hanya akan memperlihatkan kedangkalan area kajian sebuah komunitas keilmuan. Dan akhirnya, analisis eklektikisme pun perlu mengklarifikasi posisi dimana mereka akan mulai berpijak, dimana destinasi mereka, serta apakah kombinasi *middle-range theory* yang dijagokan akan mampu menengahi oposisi biner seperti universal versus partikular, termasuk ukuran moralitas konservatif antara benar dan salah.

Semua model analisis dan pendekatan teoritis dalam Studi Hubungan Internasional memiliki relevansi secara praktis dan logis. Penulis berkesimpulan bahwa ketidakmampuan seseorang untuk menyerap maksud dan menterjemahkan substansi metateori ke dalam kehidupan nyata bukanlah referensi valid untuk mengatakan teori hubungan internasional tidak relevan bagi dunia sosial dan kebijakan.

Daftar Pustaka

Buku

- Dietze, Erich Von, 2001, *Paradigma Explained: Rethinking Thomas Kuhn's Philosophy of Science*. Westport, Conn., Praeger.
- Guthrie, Gerard, 2010. *Basic Research Methods: An Entry to Social Science Research*. New Delhi: SAGE India.
- Hocking, Brian dan Michael Smith, 1995. *World Politics: An Introduction to International Relations*. London: Prentice Hall.

- Kowert, Paul, 2001. "Towards A Constructivist Theory of Foreign Policy", dalam Vendulka Kubalkova, ed, *Foreign Policy in A Constructed World*. New York & London: M. E. Sharpe.
- Kratochwil, Friedrich, 2010. *The Puzzles of Politics Inquiries into the Genesis and Transformation of International Relations*. Hoboken: Taylor & Francis.
- Kubalkova, Vendulka, 2001, "Foreign Policy, International Politics and Constructivism", dalam Vendulka Kubalkova, ed, *Foreign Policy in A Constructed World*. New York & London: M.E. Sharpe.
- Long, James D et al., 2012. *TRIP Around the World: Teaching, Research and Policy Views on International Relations in 20 Countries*. Milliamburg: TRIP Project.
- MacKendrick, Kenneth, 2007. *Discourse, Desire and Fantasy in Jurgen Habermas' Critical Theory*. Hoboken: Taylor & Francis.
- McKenzie, George, et al., 1997. *Understanding Social Research*. London: Routledge Falmer.
- Reus-Smit, Christian, 2008. "Constructivism and the Structure of Reasoning", dalam Richard Price, ed., *The Limit of Moral and Possibility in World Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Reus-Smit, Christian dan Duncan Snidal, 2008. *The Oxford Handbook of International Relations*, Oxford, New York: Oxford University Press.
- Sil, Radra dan Peter J. Katzenstein, 2010. *Beyond Paradigm: Analytical Eclecticism in the Study of World Politics*: Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Smith, Thomas W. 1999, *History and International Relations*. London: Routledge.
- Snedeker, George, 2004. *The Politics of Critical Theory: Language. Discourse/Society*. Maryland: University Press of America.

Jurnal

- Anastas, Jeane, 2012. "From Scientism to Science: How Contemporary Epistemology Can Inform Practice Research", *Critical Social Work Journal*, **40** (2): 257-265.
- Barry, Nicholas, 2006. "Defending Luck Egalitarianism", *Journal of Applied Philosophy*, **23** (1): 89-107.
- Brettschneider, Corey, 2011. "Defending the Value Theory of Democracy: A Response to Six Critics", *Representation*, **47** (1): 73-83.
- Byman, Daniel L. dan Kenneth M. Pollack, 2001. "Let Us Now Praise 'Great Men': Roles of Individuals in International Relations", *International Security*, **25** (4).
- Chen, Ching Chang, 2012. "The Impossibility of Building Indigenous Theories in A Hegemonic Discipline: The Case of Japanese International Relations Theory", *Asian Perspective*, **36** (3).

- Franke, Ulrich dan Ralph Weber, 2012. "At the Papini Hotel: On Pragmatism in the Study of International Relations", *European Journal of International Relations*, **18** (4): 669-691.
- Mantena, Karuna, 2012. "Another Realism: The Politics of Gandhian Nonviolence", *American Political Science Review*, **106** (2): 455-470.
- _____, 2012. "International Relations, Irrelevant? Don't Blame Theory", *Millennium – Journal of International Studies*, **40**: 525-542.
- Van Munster, Rens, 2008. "From Wendt to Kuhn: Reviving the Third Debate in International Relations", *International Politics*, **45** (6): 720-746.
- Wallace, William, 1996. "Truth and Power, Monks and Technocrats: Theory and Practice in International Relations", *Review of International Studies*, **22** (3): 301-321.